

Meningkatkan Perlindungan dan Pemulihan Hak Secara Perdata terkait Kawin Paksa

Makalah Konsultasi - Versi Ikhtisar

Juli 2024

Pengakuan Tanah Air

Kami mengakui wali tradisional Australia dan mengakui pertalian mereka yang berkelanjutan dengan daratan, laut dan komunitas. Kami memberi hormat kepada orang-orangnya, budayanya, dan para tetuanya di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.

© Commonwealth of Australia 2024

Selain Emblem Persemakmuran, seluruh materi yang disajikan dalam terbitan ini diberikan berdasarkan Creative Commons Attribution 4.0 International Public License di <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>.

Ini berarti lisensi ini hanya berlaku pada materi sebagaimana yang diatur di dalam dokumen ini.

Rincian dari persyaratan lisensi yang relevan tersedia di situs web Creative Commons di <https://creativecommons.org/> demikian pula kode hukum lengkap untuk lisensi CC BY 4.0 di <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>.

Penggunaan Emblem

Ketentuan yang mengatur penggunaan Emblem dirinci di

Situs web Departemen Perdana Menteri dan Kabinet— <https://www.pmc.gov.au/government/commonwealth-coat-arms>.

Bantuan dan dukungan

Jika ada kekhawatiran yang mendesak atas keselamatan Anda, keselamatan orang lain, atau ada keadaan darurat, hubungilah Triple Zero (000).

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang atau berisiko mengalami kawin paksa, Anda dapat membuat laporan ke [Polisi Federal Australia](#) atau menelepon 131 237, atau menghubungi [My Blue Sky](#) melalui situs web mereka atau dengan menelepon 02 9514 8115 (Senin-Jumat pukul 09.00 – 17.00), waktu Sydney). My Blue Sky adalah layanan nasional Australia untuk orang-orang yang mengalami kawin paksa atau khawatir akan dipaksa menikah.

Layanan berikut juga dapat memberi Anda bantuan dan dukungan:

- [Lifeline](#) (13 11 14) – Layanan dukungan nasional untuk keadaan krisis dan pencegahan bunuh diri, tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu
- [1800Respect](#) (1800 737 732) – Layanan Konseling terkait masalah Pelecehan Seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Keluarga Nasional, tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu
- [13YARN](#) (13 92 76) adalah saluran dukungan untuk warga Aborigin dan Selat Torres yang mengalami krisis, tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu
- [Kids Helpline](#) – Dukungan nasional yang dirancang untuk anak-anak dan remaja (berusia 5 hingga 25 tahun) yang mengalami krisis, tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Memberikan masukan

Untuk memberikan masukan sebagai tanggapan atas makalah konsultasi ini, kunjungi [Commonwealth Attorney-General's Department's Consultation Hub](#) (Pusat Konsultasi Departemen Kejaksaan Agung Persemakmuran) lalu klik 'Make a submission'. Ini akan membawa Anda ke survei online yang memuat pertanyaan-pernyataan konsultasi yang tercantum dalam makalah ini. Anda tidak perlu menjawab setiap pertanyaan. Anda juga dapat mengunggah masukan yang berdiri sendiri melalui Pusat Konsultasi.

Tanggapan Anda dapat diserahkan dengan menuliskan nama Anda atau secara anonim. Jika Anda memberikan persetujuan kepada kami, kami akan mempublikasikan tanggapan-tanggapan Anda pada akhir masa konsultasi. Kami tidak akan memublikasikan tanggapan jika Anda tidak menyetujuinya, atau jika memublikasikan masukan tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum. Masukan dapat tunduk pada permintaan terkait kebebasan informasi, atau permintaan dari Parlemen.

Data pribadi yang didapat melalui proses konsultasi akan diperlakukan sesuai dengan *Undang-Undang Privasi Tahun 1988* (Persemakmuran). Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana Departemen Kejaksaan Agung mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan data pribadi, silakan kunjungi [Kebijakan Privasi Departemen Kejaksaan Agung](#).

Jalur konsultasi lainnya

Jika Anda ingin memberikan tanggapan Anda secara tatap muka atau melalui video atau panggilan telepon, atau Anda memiliki persyaratan aksesibilitas lainnya, atau ingin memberikan tanggapan Anda dalam bahasa selain bahasa Inggris, silakan hubungi ForcedMarriage@ag.gov.au.

Masa konsultasi

Konsultasi dimulai pada 29 July 2024 dan ditutup pada 23 September 2024.

Pertanyaan

Jika Anda ingin membicarakan umpan balik Anda, silakan hubungi ForcedMarriage@ag.gov.au.

Kata Pengantar

Setiap orang di Australia bebas memilih untuk menikah atau tidak, dengan siapa, dan kapan ia akan menikah. Membuat seseorang menikah padahal orang tersebut tidak menginginkannya tidak pernah dapat diterima dan merupakan kejahatan di Australia.

Kawin paksa terjadi ketika seseorang menikah tanpa menyetujui dengan sepenuhnya dan sukarela. Hal ini dapat terjadi karena ia dipaksa, diancam atau dikelabui, atau ia berusia di bawah 16 tahun. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja, namun wanita dan anak perempuan adalah kelompok yang paling berisiko.

Pemerintah Australia sedang mempertimbangkan opsi-opsi untuk meningkatkan respons nasional terhadap kawin paksa, termasuk dengan:

- membangun pemahaman bersama mengenai kawin paksa sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga untuk meningkatkan akses korban/penyintas terhadap layanan keluarga dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga
- meningkatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran untuk mendukung identifikasi dini, intervensi dan pencegahan
- memperkuat perlindungan sipil dan pemulihan yang tersedia bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa.

Masukan masyarakat Australia penting untuk memastikan upaya ini memenuhi kebutuhan masyarakat.

Langkah-langkah yang dijelaskan dalam makalah ini tidak mewakili pandangan yang disepakati oleh pemerintah Persemakmuran, negara-negara bagian atau teritori, atau mengharuskan pemerintah untuk mengambil tindakan.

Respons yang ada saat ini

Respons Pemerintah Australia terhadap kawin paksa dituangkan dalam [Rencana Aksi Nasional untuk Memerangi Perbudakan Modern 2020 – 2025](#). Rencana Aksi Nasional mencakup komitmen untuk mengembangkan model untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa.

Kitab Hukum Pidana (Persemakmuran) juga memuat delik yang mengkriminalisasi kawin paksa. Ini diberlakukan pada tahun 2013. Membuat seseorang menjalani kawin paksa, atau menjadi salah satu pihak dalam kawin paksa adalah tindakan ilegal. Kecuali jika Anda sendiri adalah menjadi korban kawin paksa, menjadi pihak dalam kawin paksa berarti Anda setuju untuk menikah dengan orang yang Anda ketahui atau curigai sebagai korban kawin paksa.

Dukungan tersedia melalui Program Dukungan untuk Orang yang Diperdagangkan (Support for Trafficked People Program atau STPP). Program ini didanai oleh Pemerintah Australia dan dilaksanakan oleh Palang Merah Australia. STPP memberikan dukungan intensif hingga 200 hari bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa. Pemerintah Australia juga telah menjanjikan dana sebesar \$12,1 juta selama 5 tahun untuk membentuk Program Dukungan Spesialis Penanganan Kawin Paksa (Forced Marriage Specialist Support Program atau FMSSP) yang baru, yang

akan menjadi program penanganan kawin paksa nasional yang akan dimulai pada bulan Januari 2025. FMSSP akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan pribadi bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa. Dukungan ini akan melayani beragam kebutuhan perseorangan, dengan fokus pada kesehatan, kesejahteraan dan dukungan sosial. Ini termasuk layanan penting seperti konseling dan akomodasi darurat jika diperlukan.

Proposal untuk konsultasi

1. Membangun pemahaman bersama mengenai kawin paksa sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga untuk meningkatkan akses korban/penyintas terhadap layanan keluarga dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga

Kawin paksa umumnya terjadi dalam konteks keluarga. Namun, di seluruh Australia, pengakuan kawin paksa sebagai suatu bentuk kekerasan keluarga dan rumah tangga berbeda-beda.

Kerangka kerja penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga mencakup perlindungan dan dukungan yang dapat memberikan manfaat bagi korban/penyintas kawin paksa. Hal ini dapat mencakup perintah perlindungan perdata, bantuan hukum, perawatan medis, konseling, bantuan keuangan dan akomodasi darurat. Namun, belum ada pengakuan yang konsisten bahwa kawin paksa adalah salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga. Akibatnya akses terhadap perlindungan dan dukungan tersebut menjadi terbatas. Hal ini mungkin terjadi karena layanan tersebut tidak tersedia bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa, atau karena kurangnya kesadaran atau pengakuan bahwa kawin paksa adalah salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga.

Tergantung pada yurisdiksinya, pemahaman bersama mengenai kawin paksa sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga dapat dicapai dengan:

- secara eksplisit memasukkan kawin paksa di dalam definisi-definisi kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga
- jika relevan, menjelaskan bahwa kawin paksa sudah termasuk dalam definisi kekerasan keluarga dan rumah tangga
- mengembangkan kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran untuk memastikan pengakuan yang lebih konsisten sebagai bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga
- memastikan definisi kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga juga dapat berlaku untuk perilaku yang terjadi sebelum kawin paksa, termasuk pemaksaan, ancaman, dan pengelabuan dengan tujuan memaksa seseorang untuk menikah.

2. Meningkatkan Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran

Para pemangku kepentingan telah menekankan pentingnya memastikan bahwa peningkatan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata terkait kawin paksa merupakan bagian dari respons yang holistik dan terkoordinasi. Hal ini mencakup pendidikan masyarakat dan peningkatan kesadaran, serta pelatihan bagi para pekerja garis depan. Pendidikan dan peningkatan kesadaran juga dapat meningkatkan jumlah orang yang mencari dukungan, dan hal ini harus berjalan seiring dengan layanan dukungan yang sesuai.

Kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran yang baru harus sesuai dengan budaya dan dikembangkan bersama komunitas yang terkena dampak kawin paksa.

Kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran yang baru dapat mencakup:

- peningkatan kesadaran yang ditargetkan, termasuk mengidentifikasi tanda-tanda kawin paksa dan cara meresponsnya, termasuk respons yang sesuai dengan budaya, mudah diakses, dan berdasarkan pengetahuan mengenai trauma

- meningkatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran, serta
- peningkatan kesadaran dan pendidikan yang ditargetkan bagi para petugas garis depan, termasuk penyedia layanan penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga.

3. Memperkuat perlindungan dan pemulihan hak secara perdata

Saat ini, mekanisme perlindungan perdata bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa masih terbatas, tidak disesuaikan dengan konteks kawin paksa, dan berbeda-beda di setiap yurisdiksi.

Perlindungan dan pemulihan hak secara perdata adalah perlindungan hukum yang dikeluarkan pengadilan untuk memastikan orang atau organisasi berperilaku dengan cara tertentu. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah bahaya di masa depan, menawarkan perlindungan cepat bagi mereka yang membutuhkan.

Di Australia, penelitian akademis dan saran dari organisasi masyarakat sipil menjelaskan perlunya memberikan perangkat hukum kepada orang-orang yang menghadapi kawin paksa untuk menghindari atau keluar dari kawin paksa. Penelitian ini berpendapat bahwa perlindungan perdata menyediakan alat tambahan yang lebih mudah diakses karena standar pembuktian yang diperlukan (pertimbangan probabilitas) lebih rendah dibandingkan dengan standar pembuktian yang diperlukan untuk hukuman pidana (tanpa keraguan yang beralasan). Penelitian juga menunjukkan bahwa perintah perdata mungkin merupakan pilihan hukum yang lebih disukai oleh sebagian orang yang khawatir anggota keluarga mereka akan ditangkap dan diadili.

Opsi untuk mewujudkan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata yang lebih baik

Pemerintah Australia sedang mempertimbangkan opsi untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan hak secara perdata sehubungan dengan kawin paksa. Dua dari opsi ini mungkin termasuk:

- **Opsi A:** mengintegrasikan peningkatan perlindungan ke dalam kerangka kerja penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga yang telah ada di tingkat Persemakmuran, negara bagian dan teritori;
 - Hal ini dapat termasuk melalui pengembangan dan persetujuan prinsip-prinsip atau fitur-fitur bersama dari perlindungan yang lebih baik bagi berbagai yurisdiksi untuk diintegrasikan sebagaimana yang sesuai dengan kerangka kerja penanganan kekerasan keluarga dan rumah tangga.

Opsi ini mengusulkan untuk mengintegrasikan perlindungan dan pemulihan perdata atas kawin paksa ke dalam kerangka kerja Persemakmuran, negara bagian dan teritori, serta kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga yang ada. Pendekatan ini akan memanfaatkan keahlian dan sistem yang telah ada. Kerangka kerja penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga berbeda-beda di setiap yurisdiksi, dan di beberapa yurisdiksi, mungkin lebih tepat untuk mengintegrasikan perlindungan perdata untuk kawin paksa ke dalam kerangka perlindungan perdata alternatif.

Dengan memanfaatkan keahlian dan sistem yang ada, opsi ini bertujuan untuk menyederhanakan akses terhadap layanan dukungan yang lebih luas, termasuk pengadilan dan perlindungan khusus. Pendidikan yang kuat, upaya peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas diperlukan untuk mendukung implementasi, dan pertukaran informasi antar yurisdiksi sangat penting untuk mendukung hal ini. Pertukaran informasi ini dapat didukung melalui Skema Nasional Perintah Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pertama, berbagai yurisdiksi dapat berfokus pada mengembangkan dan menyetujui prinsip-prinsip atau fitur-fitur bersama dari perlindungan yang lebih baik untuk diintegrasikan sebagaimana yang sesuai dengan kerangka kerja penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga. Dengan menyetujui prinsip-prinsip atau fitur-fitur pemerintah akan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, sambil tetap mempertahankan fleksibilitas dalam implementasinya. Yurisdiksi dapat memilih untuk menggunakan mekanisme yang ada, misalnya kerangka kerja penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga, menetapkan kerangka kerja baru atau menggunakan metode lain yang lebih disukai untuk menanamkan dan menangani prinsip-prinsip tersebut.

- **Opsi B:** menetapkan perlindungan baru melalui undang-undang Persemakmuran, dengan dukungan implementasi dari pemerintah negara bagian dan teritori.

Opsi B mengusulkan pembentukan perintah yang baru terkait kawin paksa melalui Undang-Undang Persemakmuran yang berdiri sendiri, yang bertujuan untuk menciptakan undang-undang yang konsisten secara nasional dan berlaku secara merata dan konsisten di semua yurisdiksi.

Seperti halnya Opsi A, kolaborasi antara semua yurisdiksi akan diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, ketepatan waktu dan efektivitas perintah tingkat Persemakmuran. Meskipun menawarkan konsistensi secara nasional, model ini berpotensi mengharuskan pemohon mengakses berbagai sistem untuk mencari perlindungan dan dukungan. Oleh karena itu, proses rujukan dan peningkatan kesadaran yang jelas akan penting untuk mengurangi risiko ini. Proses pembagian informasi yang efektif juga akan memainkan peran penting dalam memfasilitasi integrasi antar yurisdiksi.

Peningkatan perlindungan dan pemulihan hak perdata – fitur-fitur utama

Landasan untuk Mengeluarkan Perintah

'Landasan untuk mengeluarkan perintah' berarti alasan pengadilan dapat mengeluarkan perintah dan hal ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Landasan potensial untuk mengeluarkan perintah untuk perlindungan perdata terkait kawin paksa dapat mencakup bahwa pengadilan meyakini, atas dasar pertimbangan probabilitas, bahwa seseorang mempunyai alasan wajar untuk takut bahwa mereka akan dipaksa menikah.

Landasan-landasan ini bisa berasal dari ancaman untuk menyakiti orang tersebut atau orang lain, risiko dibawa ke luar negeri untuk dikawinkan secara paksa, atau perilaku yang bersifat memaksa. Alasan-alasan yang sudah ada dalam kerangka kerja negara bagian dan teritori akan tetap relevan, termasuk kekerasan yang nyata atau yang diantisipasi akan terjadi.

Cakupan Perintah

Cakupan perintah menguraikan kisaran perintah yang mungkin ingin:

- mencegah kawin paksa
- membantu seseorang untuk keluar dari kawin paksa
- melindungi seseorang dari bahaya yang mungkin mereka alami sehubungan dengan kawin paksa.

Prioritas akan diberikan kepada perlindungan perdata yang mengatasi risiko dan bahaya yang paling umum dan signifikan yang dihadapi, termasuk perintah yang:

- mencegah tergugat untuk memaksa, berusaha memaksa, membantu atau bersekongkol dalam perkawinan paksa yang melibatkan orang yang dilindungi
- menghalangi tergugat mengambil langkah-langkah untuk mengadakan perkawinan bagi orang yang dilindungi, misalnya mengajukan permohonan paspor bagi orang yang dilindungi, memesan tiket pesawat, menyewa penghulu/penyelenggara pernikahan atau mengisi surat pemberitahuan niat untuk menikah
- mencegah tergugat memaksa, mencoba memaksa atau memaksa seseorang untuk tetap berada dalam kawin paksa
- mencegah dikeluarkannya orang yang dilindungi dari Australia
- mencegah orang yang dilindungi dari melakukan perjalanan internasional, dalam keadaan luar biasa, dan diimbangi dengan pertimbangan hak asasi manusia
- mewajibkan agar paspor orang yang dilindungi diserahkan kepada Pengadilan, dalam keadaan luar biasa, dan diimbangi dengan pertimbangan hak asasi manusia
- mendukung repatriasi seseorang yang dibawa ke luar negeri untuk tujuan kawin paksa, termasuk dengan mewajibkan tergugat untuk membantu repatriasi orang yang dilindungi dengan cara yang ditentukan (misalnya memesan penerbangan bagi orang yang dilindungi untuk kembali ke Australia)
- mengharuskan tergugat untuk mengungkapkan di mana orang yang dilindungi
- mencegah tergugat memaksa, membantu, atau bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh perintah tersebut
- mencegah responden melakukan tindakan atau jenis kejahatan tertentu.

Penggugat

Korban/penyintas mungkin menghadapi hambatan dalam mengajukan perintah perlindungan perdata. Untuk mengatasi hal ini, diusulkan agar sejumlah orang diperbolehkan mengajukan permohonan perintah perlindungan perdata atas nama orang yang berisiko mengalami kawin paksa. Yang berpotensi menjadi penggugat dapat mencakup:

- orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa
- orang tua atau wali
- petugas polisi
- lembaga perlindungan anak
- organisasi masyarakat tertentu, penyedia layanan, dan/atau lembaga swadaya masyarakat lainnya
- pengadilan sendiri dapat menginisiasi perintah jika dianggap perlu selama proses persidangan lainnya.

Meski pun jenis pemohon yang lebih banyak akan menyediakan lebih banyak jalur yang dapat diakses guna mendapatkan perlindungan perdata, mungkin ada juga risikonya, misalnya

mempersulit pengadilan untuk menentukan apakah pemohon bertindak demi kepentingan korban/penyintas.

Tergugat

Tergugat adalah orang yang dikenai atau diberi perintah perlindungan perdata. Persyaratan untuk memberikan perintah perlindungan perdata dapat berbeda-beda di seluruh Australia. Beberapa kerangka kerja mengharuskan perintah ditujukan kepada anggota keluarga atau pasangan intim korban/penyintas, sementara yang lain mengizinkan pengadilan untuk memberikan perintah tersebut terhadap siapa pun.

Untuk meningkatkan perlindungan perdata atas kawin paksa, yang dapat menjadi terduga dapat mencakup:

- anggota keluarga, termasuk orang tua dan anggota keluarga besar
- orang yang berniat menjadi pasangan dari orang yang berisiko mengalami kawin paksa
- penghulu/penyelenggara pernikahan, termasuk untuk upacara keagamaan, budaya atau sipil
- orang lain yang terlibat dalam memaksa seseorang untuk menikah, termasuk ketika mereka memaksa, berusaha memaksa, membantu, atau bersekongkol untuk mengadakan kawin paksa.

Keinginan penyintas/korban

Pertimbangan keinginan korban/penyintas sangat penting untuk memastikan bahwa keinginan mereka dihormati selama proses perlindungan perdata, khususnya dalam kasus di mana perintah dapat berdampak pada hak asasi manusia dan kebebasan mereka. Ketentuan yang diusulkan akan memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan keinginan orang yang dilindungi ketika mengeluarkan perintah.

Korban/penyintas juga mungkin menghadapi tekanan dari keluarga dan anggota masyarakat untuk menentang atau membatalkan perintah perlindungan. Hal ini juga memerlukan pertimbangan.

Perlindungan di ruang sidang dan bantuan melalui proses hukum

Saat ini terdapat perlindungan di ruang sidang yang tersedia melalui sistem penanganan kekerasan keluarga dan rumah tangga, termasuk bagi saksi rentan atau saksi khusus yang mengajukan permohonan perlindungan perdata, dan diusulkan agar orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa harus diberikan perlindungan yang sama.

Perlindungan di ruang sidang dapat mencegah intimidasi terhadap saksi dan mendukung keselamatan dan kesejahteraan mereka.

- pengaturan untuk memastikan korban/penyintas tidak perlu melihat terduga, misalnya dengan menggunakan layar/sekat atau dengan memberikan kesaksian melalui tautan audio-visual
- didampingi seorang pendukung di pengadilan
- memberikan kesaksian di pengadilan tertutup
- tidak diperiksa silang oleh terduga yang tidak diwakili pengacara.

Layanan dan tindakan lain mungkin juga tepat untuk menyederhanakan dukungan bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa yang mengajukan permohonan perlindungan perdata, termasuk:

- kegiatan-kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran bagi petugas garis depan, staf hukum, pengadilan dan sistem peradilan (lihat Bagian 2)
- layanan dukungan untuk membantu korban/penyintas dengan permohonan mereka
- jalur untuk merujuk mereka yang berisiko ke layanan dukungan yang didanai pemerintah.

Perintah sementara dan sidang ex-parte

Perintah sementara dan ex-parte memungkinkan diadakannya sidang darurat untuk mengeluarkan perintah perlindungan perdata. Proses tersebut tidak mengharuskan pemberitahuan untuk diberikan kepada pihak lain dan umumnya dibatasi waktunya hingga proses pengadilan biasa dapat dilakukan. Pengadilan umumnya mengeluarkan perintah sementara atau ex-parte. Namun, undang-undang dapat dirancang untuk memungkinkan pihak-pihak seperti petugas polisi untuk membuat perintah sementara atau ex-parte dalam keadaan tertentu. Korban/penyintas kawin paksa mungkin menghadapi risiko langsung terhadap keselamatan mereka. Oleh karena itu diusulkan agar perintah sementara dan/atau ex-parte yang dibuat oleh pengadilan tersedia bagi mereka, jika diperlukan, untuk menjamin keselamatan mereka.

Pelayanan, Pemberlakuan dan Pelanggaran

Di Australia, umumnya petugas polisi bertanggung jawab untuk menyerahkan surat perintah perlindungan perdata, dan diusulkan agar polisi juga menyerahkan surat perintah perlindungan perdata terkait kawin paksa kepada tergugat. Hal ini akan memberikan jaminan tingkat tinggi bahwa tergugat mengetahui adanya perintah tersebut, mendorong kepatuhan, akuntabilitas, dan jaminan keselamatan orang yang dilindungi.

Pemulihan Hak Lainnya

Mungkin terdapat pemulihan hak lain yang dapat dipertimbangkan dalam sebuah model untuk memberikan perlindungan dan solusi secara perdata yang lebih baik terkait kawin paksa, misalnya dengan penyederhanaan proses pembatalan pernikahan bagi mereka yang menjalani kawin paksa.

Faktor risiko dan hambatan dalam mencari dukungan

Kawin paksa tidak hanya terjadi pada satu kelompok budaya, agama, atau etnis. Namun, beberapa komunitas mungkin menghadapi risiko yang lebih tinggi karena faktor-faktor seperti pengungsian, status visa, kendala bahasa, atau kurangnya dukungan komunitas. Diskriminasi dan kurangnya layanan yang aman secara budaya dapat mempersulit mereka yang berisiko untuk mendapatkan bantuan. Penyandang disabilitas mungkin juga menghadapi tantangan tambahan. Tekanan keluarga dan budaya juga dapat mempersulit individu untuk melaporkan anggota keluarga atau masyarakat.

Mendukung anak-anak

Perlindungan yang saat ini ada untuk anak-anak tersedia melalui kerangka kerja perlindungan anak negara bagian dan teritori dan melalui *Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1975* (Persemakmuran). Namun, pertimbangan tambahan perlu diberikan pada dukungan spesifik dan kebutuhan akses bagi anak-anak yang ingin menghindari atau keluar dari kawin paksa. Hal ini dapat mencakup pertimbangan dukungan tambahan untuk mengakses dokumen dan formulir pengadilan, serta perlindungan yang sesuai di ruang sidang.

Kesimpulan

Umpan balik yang diberikan melalui konsultasi ini akan menjadi masukan bagi seluruh upaya pemerintah Australia dalam mengembangkan model guna meningkatkan perlindungan dan pemulihan hak terkait kawin paksa. Upaya ini terus berlanjut dan tunduk pada pertimbangan dan keputusan lebih lanjut oleh semua yurisdiksi.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar tambahan, Anda dipersilakan untuk menghubungi Departemen Kejaksaan Agung di ForcedMarriage@ag.gov.au.

Pertanyaan konsultasi gabungan

Proposal untuk konsultasi

1. Apakah pilihan-pilihan ini efektif untuk meningkatkan respons yang konsisten secara nasional terhadap kawin paksa? Apakah ada opsi lain yang harus dipertimbangkan?

Bagian 1: Membangun pemahaman bersama mengenai kawin paksa sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga untuk meningkatkan akses korban/penyintas terhadap layanan keluarga dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga

2. Haruskah kawin paksa diakui sebagai bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga? Mengapa?
3. Apa saja panduan hukum, perubahan kebijakan, atau panduan tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan pengakuan bahwa kawin paksa adalah bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga?
4. Peningkatan atau panduan tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk membantu layanan penanganan kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga agar lebih konsisten mengenali kawin paksa sebagai bentuk kekerasan dalam keluarga dan rumah tangga?

Bagian 2: Meningkatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran

5. Topik apa saja yang dapat menjadi fokus dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran?
6. Siapa yang harus terlibat dalam pendidikan dan peningkatan kesadaran di komunitas yang terdampak kawin paksa?
7. Kelompok masyarakat manakah yang memerlukan pendidikan dan peningkatan kesadaran mengenai kawin paksa (misalnya pekerja garis depan seperti polisi, petugas perlindungan anak dan/atau kelompok tertentu dalam masyarakat)?

Bagian 3: Memperkuat perlindungan dan pemulihan hak secara perdata

Proposal untuk umpan balik

8. Menurut Anda, apakah ada kesenjangan dalam perlindungan hukum yang tersedia untuk menanggapi dan mencegah kawin paksa di Australia? Jika ya, apa saja kesenjangan tersebut dan apakah kesenjangan tersebut memerlukan respons nasional?
9. Makalah ini membahas dua opsi untuk memperkuat perlindungan hukum perdata: Opsi A (meningkatkan undang-undang yang ada, mungkin melalui prinsip-prinsip bersama) dan Opsi B (memperkenalkan undang-undang Persemakmuran yang berdiri sendiri). Manakah dari dua opsi penerapan tadi yang paling efektif dan mengapa? Apa saja risiko utamanya? Apakah ada opsi lain yang perlu dipertimbangkan?
10. Berdasarkan Opsi A, apakah terdapat alternatif kerangka perlindungan perdata selain kerangka kerja penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga yang dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan perdata atas kawin paksa?

Landasan untuk Mengeluarkan Perintah

11. Bukti apa, atau jenis tindakan, risiko atau bahaya lain yang terkait dengan kawin paksa yang harus dianggap sebagai landasan untuk memohon perintah perlindungan perdata atas kawin paksa?

Cakupan Perintah

12. Apakah proposal perlindungan yang tercantum di atas mengatasi risiko dan bahaya paling umum dan signifikan yang dihadapi oleh orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa, termasuk anak-anak? Jika tidak, apa lagi yang harus diatasi?
13. Apakah ada risiko lain atau konsekuensi yang tidak disengaja dari proposal perlindungan tersebut yang perlu dipertimbangkan?

Penggugat

14. Apakah ada orang atau organisasi tambahan yang semestinya dapat mengajukan permohonan perlindungan perdata untuk kasus kawin paksa? Jika ya, siapa dan mengapa?
15. Apakah ada risiko yang terkait dengan pemberian kemampuan kepada individu atau organisasi tertentu untuk mengajukan permohonan perintah perlindungan? Jika ya, apa saja risiko-risiko tersebut dan bagaimana cara mengurangi risiko tersebut?

Tergugat

16. Haruskah ada batasan mengenai siapa yang dapat menjadi tergugat dalam perlindungan perdata kawin paksa? Jika ya, bagaimana cara mendefinisikannya (misalnya hanya anggota keluarga)?

Keinginan penyintas/korban

17. Bagaimana cara mengatasi risiko korban/penyintas dipaksa untuk membatalkan perintah?
18. Bagaimana cara terbaik untuk mencari tahu dan memasukkan pandangan para korban/penyintas, termasuk anak-anak, ke dalam proses persidangan dan pemberian perlindungan perdata pada kasus kawin paksa?

Perlindungan di ruang sidang dan bantuan melalui proses hukum

19. Dukungan lain apa yang sebaiknya tersedia bagi orang-orang yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa, termasuk anak-anak, untuk mendukung mereka menjalani proses permohonan perintah perlindungan perdata? Misalnya, dukungan tambahan saat melalui proses permohonan, atau perlindungan tambahan di ruang sidang.

Perintah sementara dan sidang ex-parte

20. Landasan apa yang relevan untuk mengeluarkan perintah sementara jika seseorang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa?
21. Apakah perintah sementara sebaiknya dibatasi sehingga mencakup sebagian, namun tidak seluruh, cakupan perintah yang diusulkan (diuraikan dalam Cakupan Perintah)? Jika ya, perlindungan apa yang harus disertakan atau dikecualikan dan mengapa?
22. Bukti apa saja yang dapat menunjukkan adanya risiko kawin paksa dan harus dipertimbangkan oleh polisi ketika mempertimbangkan landasan untuk mengeluarkan perintah sementara jika seseorang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa?

Pelayanan, Pemberlakuan dan Pelanggaran

23. Apakah ada keadaan di mana surat perintah tidak perlu disampaikan secara pribadi (misalnya penyampaian secara elektronik)? Jika ya, keadaan apa sajakah keadaan itu?

Pemulihan Hak Lainnya

24. Apakah ada pemulihan hak, selain perlindungan perdata, yang perlu dipertimbangkan bagi mereka yang mengalami atau berisiko mengalami kawin paksa?
25. Saat ini, apakah korban/penyintas kawin paksa menghadapi hambatan atau kesulitan ketika meminta pernyataan ketidaksahan perkawinan sehubungan dengan kawin paksa yang mereka alami? Jika ya, bagaimana hambatan atau kesulitan tersebut dapat diatasi?

Faktor risiko dan hambatan dalam mencari dukungan

26. Apa saja risiko dan hambatan dalam mencari dukungan bagi orang-orang yang berisiko atau mengalami kawin paksa? Strategi apa yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi hal ini?
27. Risiko dan hambatan apa yang mungkin dihadapi seseorang jika mereka mencari perlindungan melalui sistem hukum? Bagaimana risiko dan hambatan ini dapat dikurangi?
28. Terlibat dalam sistem dukungan dan sistem hukum dapat meningkatkan risiko bagi orang yang menghadapi kawin paksa. Apakah ada tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh petugas garis depan atau layanan hukum ketika seseorang mungkin berisiko mengalami kawin paksa?

Mendukung anak-anak

29. Dukungan dan perlindungan tambahan apa yang dapat dipertimbangkan untuk membantu anak-anak mengakses perlindungan hukum yang diusulkan dan membantu mereka menjalani proses permohonan, ruang sidang, dan proses hukum lainnya?